

Peran UN Women Terhadap *Gender-Based Violence* di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018

Pipin Indra Rohmawati ¹⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
email: pipinindrarohmawati17@gmail.com

Satria Rizaldi Alchatib^{2*)}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Setyasih Harini³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
setya_rini@unisri.ac.id

*) Corresponding Author

ABSTRACT

Cases of GBV (gender based violence) against women in India are an extreme manifestation of gender injustice targeting women and girls in the form of psychological, physical or sexual abuse. These manifestations of violence are rooted in various forms of discrimination and inequality faced by women. Apart from that, social norms such as patriarchy also cause Dalit women to become targets or victims of violence. Patriarchy basically encourages or justifies men to commit violence against women. The purpose of this study is to find out the role of UN WOMEN in the field of empowering women and children or gender equality, in the GBV (Gender Based Violence) Case in India with case studies of Dalit caste women in the 2016-2018 period. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods. Research that uncovers social situations, does not use statistics, but data collection is analysis. UN Women plays a role in addressing inequality, and building resilience, by undertaking UN-Women's ongoing efforts to strengthen women's institutions, leadership and strategic interventions, to ensure that the voices of Dalit (Scheduled Castes), Ethnic (Scheduled Tribes) and religious minorities are heard and reflected in policy making. UN Women also plays a role and supports the formation of women's empowerment groups called Jugnu Clubs, in all tea plantations in Assam with the aim of preventing violence against women.

Keywords: *Feminism, GBV, dalit caste, UN-WOMEN*

ABSTRAK

Kasus (*gender-based violence*) GBV terhadap perempuan di India merupakan manifestasi ekstrim dari ketidakadilan gender yang menargetkan perempuan dan anak perempuan berupa pelecehan psikologis, fisik atau seksual. Manifestasi kekerasan tersebut berakar pada berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu norma sosial seperti patriarki juga menjadi penyebab perempuan dalit menjadi target atau korban dari kekerasan. Patriarki pada dasarnya mendorong atau menjadi justifikasi bagi laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran *UN WOMEN* dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak atau kesetaraan gender, dalam Kasus (*Gender Based Violence*) GBV di India dengan studi kasus perempuan kasta dalit dalam kurun waktu 2016-2018. Di penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang mengungkap situasi sosial, tidak menggunakan statistik, tetapi pengumpulan datanya analisis. *UN Women* turut berperan mengatasi ketimpangan, dan membangun ketahanan, dengan melakukan upaya berkelanjutan *UN-Women* untuk memperkuat lembaga-lembaga perempuan, kepemimpinan dan intervensi strategis, untuk memastikan bahwa suara Dalit (Kasta Terjadwal), Suku (Suku Terjadwal) dan agama minoritas didengar dan direfleksikan dalam pembuatan kebijakan. *UN Women* turut berperan dan mendukung pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan yang di sebut *Jugnu Clubs*, diseluruh perkebunan teh di Assam dengan tujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Kata kunci: Feminisme, GBV, kasta dalit, *UN-WOMEN*

Pendahuluan

Di ranah internasional isu kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi dan pelanggaran atas hak asasi manusia. Hukum internasional atau pun nasional dalam hal ini memainkan peran penting dan dapat berinteraksi dengan norma-norma guna mengurangi timbulnya kekerasan (Klugman et al., 2017). Kekerasan berbasis gender GBV mengacu pada tindakan berbahaya yang diarahkan pada individu berdasarkan gendernya. Ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan dan norma-norma yang berbahaya (Union et al., 2022). Disebut GBV karena menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat (Umin Kango, 2009). GBV merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan masalah kesehatan serta perlindungan yang mengancam jiwa. Diperkirakan satu dari tiga wanita pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik dalam hidupnya (Unfpa.org, 2016). GBV ini merupakan kekerasan yang ditujukan pada suatu individu atau pun kelompok atas dasar pada gendernya (Priyanka Garodia, 2021).

GBV ini sering diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan, antara lain pelecehan verbal, kekerasan seksual, pembunuhan bayi perempuan, perdagangan orang, pemerkosaan laki-laki, pernikahan paksa pada perempuan usia muda, dan berbagai kekerasan yang ditujukan

kepada (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) LGBT (Priyanka Garodia, 2021). GBV berkisar dari kekerasan fisik, seksual, emosional, dan keluarga lainnya hingga mutilasi alat kelamin perempuan, pernikahan anak pada usia dini, perdagangan manusia dan kekerasan seksual sebagai senjata perang. GBV perlu ditangani terutama dalam situasi darurat. Situasi darurat seperti pada saat situasi konflik atau peperangan (Unfpa.org, 2022).

Kasus GBV terhadap perempuan di India ini merupakan manifestasi ekstrim dari ketidakadilan gender yang menargetkan perempuan dan anak perempuan karena status sosial perempuan yang tersubordinasi di masyarakat. Ini dapat berupa pelecehan psikologis, fisik atau seksual, dan dalam semua manifestasinya, itu dapat memiliki implikasi serius bagi kesehatan seksual dan reproduksi wanita. Kekerasan dan ancaman kekerasan dapat dialami oleh setiap perempuan tanpa memandang usia, warna kulit, agama, dan status ekonomi atau sosial (hindrise.org, 2018). Kasus GBV di India itu didefinisikan sebagai kerusakan fisik, seksual, dan psikologis, yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakatnya. Dalam kasus India, akar GBV dapat ditelusuri ke banyak elemen sosial budaya (Seshasayee, 2019). Fenomena kekerasan terhadap perempuan muncul dari paham patriarki tentang kepemilikan atas tubuh perempuan, seksualitas, tenaga kerja, hak reproduksi, mobilitas dan tingkat otonomi (Saha, 2021).

Dalam masyarakat India, perempuan secara tradisional didiskriminasi dan dikeluarkan dari keputusan terkait politik dan keluarga (Humanium.org, 2011). Masyarakat India sendiri menganggap rendah status perempuan. Masyarakat menganggap bahwa anak perempuan hanya akan menjadi beban bagi keluarganya. Sebagian besar perempuan dan anak perempuan di India tidak sepenuhnya mendapatkan hak dan kewajibannya, hal tersebut dikarenakan pandangan, norma, tradisi dan budaya patriarkinya masih mengakar kuat (Unicef.org, 2021). Selain itu faktor lain yang dapat memperburuk terjadinya kekerasan yaitu faktor sosial, ekonomi kasta, kelas, dan agama. Dalam hal tersebut memungkinkan bahwa norma-norma sosial patriarki yang masih ada di masyarakat melahirkan kekerasan (Saha, 2021).

Kekerasan ini semakin bertambah di sepanjang penanda kelas, kasta, agama dan etnis. Sistem kasta di India sudah terpatri sejak seorang individu terlahir ke dunia. Kasta keluarga menentukan banyak hal dalam kehidupan warga India, seperti pekerjaan, tingkat kesucian rohani dan kelas sosial. Dalit merupakan golongan kasta paling bawah sering dipandang sebelah mata karena dianggap mengotori kesucian orang lain dan terlahir untuk dieksploitasi (CNN, 2014a). Padahal dalam konstitusi India sudah dijelaskan pada BAB III tentang Hak Dasar Nomor 15 mengenai Hak Atas Kesetaraan yang berbunyi:

“Larangan diskriminasi atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin atau tempat lahir”

dan dijelaskan pula pada point 1 yang berbunyi:

“Negara tidak boleh mendiskriminasikan setiap warga negara hanya berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin, tempat kelahiran atau salah satunya” (Raju, 2020).

Diskriminasi berdasarkan kasta dilarang oleh konstitusi India pada tahun 1950, praktik 'tak tersentuh' masih menentukan tatanan kehidupan modern bagi jutaan orang yang tinggal di India. Sistem kasta di India ini telah digambarkan sebagai 'apartheid tersembunyi' di negara itu (childrenontheedge.org, 2017).

Dalit "kelas terbelakang", sering menjadi korban dari banyak dan bentuk-bentuk diskriminasi yang saling bersilangan, serta kekerasan. Berbasis kasta diskriminasi, yang juga mencakup hierarki intra-kasta, terus berlanjut meresap dan meluas. Sifat antar generasi berdasarkan kasta diskriminasi mengutuk perempuan ke dalam kehidupan pengucilan, marginalisasi dan kelemahan dalam setiap bidang kehidupan. Banyak dari perempuan kasta dalit itu ditolak dalam kesempatan pendidikan, kesehatan, keamanan, atau pun ekonomi (Policy & Note, 2021). Pada kultur India kehidupan sosial kasta dalit ini menempati kelas terbawah. Sedangkan dalam parameter sosial kasta ini diperlakukan tidak manusiawi dan juga mengalami diskriminasi serta eksploitasi (CNN, 2014b). Sejak kemerdekaan India, dalit masih mengalami diskriminasi dan perlakuan buruk yang kejam di tangan anggota kasta atas dan pejabat penegak hukum (Bina B. Hanchinamani, 2001). Sebagian besar masyarakat India mendukung kesetaraan gender, tetapi *survei pew research* baru menemukan bahwa norma gender tradisional masih berlaku bagi banyak orang di negara ini (Diamant, 2022). Karena norma-norma sosial membuat perempuan tunduk pada urusan rumah tangga, perempuan seringkali harus tinggal di rumah dan merawat yang muda dan yang tua. Penyebab ketidaksetaraan gender di India ini menciptakan sistem yang tidak seimbang yang membuat perempuan rentan (Weforum.org, 2019).

Berkaitan dengan bentuk penindasan diatas, pada 28 Maret 2016 berdasarkan artikel yang dilansir oleh (Couderé, 2016) Delta Meghna seorang gadis Dalit berusia 17 tahun diperkosa, di Bikaner, sebuah kota di Rajasthan. Pada tahun 2017 di distrik Rohtak perempuan berusia 23 tahun diperkosa beramai-ramai kemudian dibunuh dan dimutilasi. Korban ditemukan setelah beberapa anjing liar terlihat berada di dekat jenazahnya yang mulai membusuk. Warga curiga dan ternyata yang dikerumuni anjing adalah jenazah (BBC, 2017). Sedangkan pada tahun 2018 (BBC, 2018) melansir bahwa delapan orang tewas ditengah protes yang melibatkan puluhan ribu pengunjuk rasa dari kasta dalit. Kerusuhan tersebut terjadi di beberapa bagian India Utara, dan India Tengah. Aksi protes tersebut didasari oleh lemahnya undang-undang yang dirancang untuk melindungi masyarakat kasta yang lebih rendah.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran *UN WOMEN* selaku organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak atau kesetaraan gender, dalam Kasus GBV di India dengan studi kasus perempuan kasta dalit dalam kurun waktu 2016-2018.

Teori Organisasi Internasional

Menurut Bhandari (2019) ada tiga kategori utama organisasi: organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organizations*) IGO, organisasi non pemerintah internasional (*International Non-Governmental Organizations*) INGO, dan perusahaan multinasional atau (MNC). Berg, (2009) menjelaskan mengenai Organisasi antar pemerintah (*Inter Governmental Organizations*) atau IGO merupakan organisasi internasional yang hanya memiliki Negara sebagai anggota, dan otoritas pengambilan keputusan terletak pada perwakilan dari pemerintah anggota. IGO melampaui batas negara dan dapat berdampak besar pada aktor pemerintah dan transnasional di dalam negara. Menurut Burmester (2019) terdapat tiga perspektif penelitian pada organisasi internasional, yaitu *Instrument*, *Arena* dan *Actor*. Sedangkan menurut Hurd (2011), organisasi internasional terdapat tiga perspektif yaitu organisasi internasional sebagai aktor, forum, dan sumber daya.

Salah satu organisasi di bawah naungan PBB yaitu *UN WOMEN*. *UN WOMEN* ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan. Di dalam sistem PBB *UN WOMEN* ini diberi mandat untuk memimpin, mempromosikan, dan mengkoordinasikan upaya untuk memajukan realisasi penuh hak dan peluang perempuan. Majelis umum PBB telah meminta semua bagian dari sistem PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam mandat mereka, dan memastikan bahwa komitmen di atas kertas mengarah pada kemajuan di lapangan (Unwomen.org, 2021c). Untuk mencapai tujuan ini *UN WOMEN* membantu memperkuat aksi PBB yang efektif di tingkat global, regional dan nasional. Serta mendukung langkah-langkah menegakkan akuntabilitas untuk komitmen terhadap perempuan, dan memiliki peran kunci dalam meningkatkan pengetahuan tentang status perempuan di PBB (Unwomen.org, 2017)

Teori Feminisme

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika wanita menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan pria. Feminisme juga dapat diartikan sebagai paradigma pergerakan atau sebuah gerakan kebudayaan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak Antara laki-laki dan perempuan (Wirasandi, 2019). Munculnya gerakan feminisme ini karena adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan, sehingga adanya gerakan ini untuk mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki (Rokhmansyah, 2016). Selain itu pemikiran feminisme ini berupaya untuk membongkar pemahaman bahwa posisi seseorang dalam masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi dan politik tidaklah ditentukan melalui jenis kelamin (Ross, 2017).

Tujuan awal feminisme ini berevolusi dari perjuangan untuk diterima sebagai makhluk yang berasio menjadi tuntutan atas hak-hak perempuan yang lebih legal (Komang & Suwastini, 2013). Pada konsep interseksionalitas ini menggambarkan pertemuan penindasan, tidak hanya menyebutkan identitas yang beragam (Ross, 2017). Namun interseksionalitas ini biasanya diasosiasikan dengan posisi penindasan; biasanya tentang perempuan miskin dan rasis yang terikat (Levine-rasky, 2011). Interseksionalitas adalah kritik terhadap kekerasan

yang menargetkan perempuan, dan dengan demikian, di mana kekerasan gender ini bermanifestasi dalam peraturan negara tentang seksualitas dan reproduksi perempuan (Center for Human Rights and Global Justice & Human Rights Watch, 2007). (Veenstra, 2011) pada kenyataannya permasalahan mengenai gender itu dipengaruhi oleh posisi kelas dan ras, bahkan juga agama. (Anand, 2018) feminisme gelombang ketiga ini muncul yang memahami tentang ketidaksetaraan gender, yang dimana dari ketidaksetaraan gender itu sebagai isu yang bersifat rasisme, homofobia, kelas dan kolonialisme. Maka dari itu (Sigiro et al., 2020) menyimpulkan bahwa feminisme interseksional ini merupakan sebuah konsep feminisme yang penting untuk melihat perbedaan situasi yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal.

Metode Penelitian

Di penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. (Lexy J. Moleong, 2017) deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Obyek penelitian ini merupakan suatu sasaran penelitian, dimana peneliti mengkaji atas isu yang akan diteliti. Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu peran *UN WOMEN* selaku organisasi internasional terhadap kasus GBV di India dengan studi kasus perempuan kasta dalit dalam kurun waktu 2016-2018. Sumber data yang diperoleh antara lain dari literatur jurnal online, berita-berita aktual yang bersifat internasional, skripsi, tesis, makalah, buku, hasil studi pustaka, dan penelitian terdahulu, laman web pemerintahan atau dari laman web organisasi internasional yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Komariah, (2017) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara library research & literatur, dengan menggunakan literatur dan laman web pemerintah, guna mengumpulkan data-data pendukung untuk diolah dalam melakukan penelitian. Dalam hal analisis data Sugiyono, (2016b) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti.

Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data atau mendisplay data. Penyajian data disini peneliti mulai mengkaji data-data yang ada, menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data yang ada dalam menyusun informasi terkait dengan obyek yang akan diteliti. analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus dimana masalah reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mengatur urutan data. Analisis data memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis.

Gender Based Violence Secara Global

GBV atau kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (VAWG), adalah pandemi global yang mempengaruhi 1 dari 3 perempuan dalam hidupnya (KALLE, 2020). Sama halnya yang disampaikan oleh (Uprety & Lamichhane, 2016) bahwa diperkirakan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia pernah mengalami pelecehan, atau dipaksa melakukan hubungan seks. Diidentifikasi sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia, jumlah perempuan dan anak perempuan yang terkena dampak sangat mengejutkan. Berdasarkan yang dilansir oleh (Worldbank.org, 2019):

- a. 35% perempuan diseluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya atau kekerasan seksual nonpasangan.
- b. Secara global 7% perempuan telah diserang secara seksual oleh orang lain selain pasangannya.
- c. Secara global sebanyak 38% pembunuhan perempuan dilakukan oleh pasangan intim
- d. 200 juta perempuan pernah mengalami mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan

(Council of Europe, 2019) juga menunjukkan jumlah kasus GBV yang sering dialami perempuan antara lain:



Gambar 4.1: jumlah kasus GBV yang sering dialami perempuan di dunia

Sumber : Council of Europe, (2019).

Dari data diatas, banyak perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Ini termasuk kekerasan fisik atau pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia di seluruh dunia yang dimana korban yang paling banyak adalah anak perempuan atau pun perempuan, kekerasan seksual selama konflik dan praktek-praktek adat atau tradisional yang berbahaya seperti mutilasi alat kelamin perempuan, pernikahan paksa atau pernikahan pada usia dini (Council of Europe, 2019).

PBB telah menggambarkan GBV ini sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum di dunia. Fenomena ini berakar kuat pada ketidaksetaraan gender yang dialami

perempuan secara global (Ster, 2020). Sedangkan (Malgesini et al., 2019) menjelaskan bahwa GBV ini berakar dan memperkuat ketidaksetaraan gender, yang dimana GBV ini melingkupi seluruh lapisan di masyarakat seperti struktur sosial, norma dan peran gender. Kasus GBV ini tidak terbatas pada wilayah atau negara mana pun, ini adalah masalah yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan dari kelas sosial dan ekonomi yang berbeda pada tingkat yang berbeda-beda (Ster, 2020). Misalnya saja di negara Mali, GBV adalah kejadian sehari-hari bagi perempuan dan anak perempuan. Situasi tersebut sangat mengkhawatirkan karena bagian utara Mali telah berada di bawah kendali kelompok bersenjata. Lebih dari 35% perempuan Mali mengalami kekerasan seksual setidaknya sekali dalam hidup. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan 2018, 89% wanita Mali berusia 15-telah menjalani (*Female Genital Mutilation*) FGM. 76% korban mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) berusia kurang dari 5 tahun. Sedangkan untuk *Intimate Partner Violence* (IPV) kekerasan dari pasangan intim sejumlah 49% wanita pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan dari pasangannya (Ndiaye, 2021).

Sedangkan di Afghanistan, Survei Demografi dan Kesehatan 2015 menemukan bahwa 87% perempuan Afghanistan mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan fisik, seksual, atau psikologis (Ross Wilson, 2020). Hampir 90% wanita di Afghanistan pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 17% pernah mengalami kekerasan seksual (WHO & HRP, 2016) Kasus GBV terkait konflik juga melanda (*Democratic Republic of Congo*) DRC Timur. Kasus kekerasan tersebut terjadi ketika DRC Timur berada di bawah kelompok bersenjata dan kelompok pemberontak Kelompok tersebut melakukan eksploitasi SDA, kekerasan terhadap penduduk termasuk pembunuhan dan pemerkosaan bahkan penyiksaan terhadap perempuan atau pun anak perempuan, selain itu kaum perempuan juga sering kali disiksa. Dalam insiden tersebut perempuan dan anak perempuan juga menghadapi peningkatan tingkat kekerasan di lingkungan sosial dan rumah (MADRE & Female Solidarity for Integrated Peace and Development, 2018).

Negara lain seperti Suriah dan Lebanon juga tengah menghadapi kasus yang sama. Sebagai akibat dari konflik di Suriah, perempuan dan anak-anak menghadapi peningkatan risiko berbagai bentuk GBV, termasuk pernikahan paksa dan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual. Di Lebanon, rata-rata nasional untuk pernikahan pada perempuan berusia sekitar 15 hingga 19 tahun (Concern.net, 2021). Sedangkan di (*Uni Eropa*) UE menurut survei pada tahun 2014 tentang kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) VAW dari Badan Hak Asasi atau (*European Union Agency for Fundamental Rights*) (FRA) (Malgesini et al., 2019) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang tersebar luas di Uni Eropa. Laporan berdasarkan wawancara dengan 42.000 wanita di 28 negara anggota UE menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, dan khususnya kekerasan berbasis gender yang berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luas yang tidak dapat diabaikan oleh UE.

Sementara itu, di India sendiri menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional mengungkapkan bahwa 30% wanita India dalam kelompok usia 15 hingga 49 tahun telah mengalami kekerasan fisik sejak usia 15 tahun dan selanjutnya menunjukkan bahwa 6% wanita dalam kelompok usia yang sama telah mengalami kekerasan seksual sedangkan 31% wanita menikah dan diperkirakan mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh pasangannya (Ster, 2020). Sedangkan di India perempuan menghadapi berbagai macam kekerasan berbasis gender antarlain : pelecehan berbasis gender terhadap bayi dan anak perempuan, mutilasi alat kelamin perempuan, kekerasan pasangan intim, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan pemerkosaan (HindRise, n.d.). Permasalahan mengenai GBV juga menjadi masalah kesehatan masyarakat global dan pelanggaran tentang hak asasi manusia. Faktanya, satu dari setiap tiga wanita di seluruh dunia dilecehkan secara fisik, seksual, atau lainnya dalam hidupnya (Wirtz et al., 2014). Malgesini et al., (2019) menjelaskan bahwa GBV ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi keluarga, komunitas dan masyarakat.

Hal tersebut kemudian dipertegas oleh (Kalle, 2020) mengenai dampak dari adanya GBV. Bahwa GBV ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kesejahteraan perempuan dan anak perempuan dan mempengaruhi potensi sumber daya manusia jangka panjang dari para penyintas, namun pada akhirnya mengurangi partisipasi pasar tenaga kerja dan kegiatan sipil dan menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat. Secara global, kekerasan terhadap perempuan diperkirakan merugikan negara hingga 3,7%, lebih dari dua kali lipat dari yang dikeluarkan sebagian besar pemerintah untuk pendidikan.

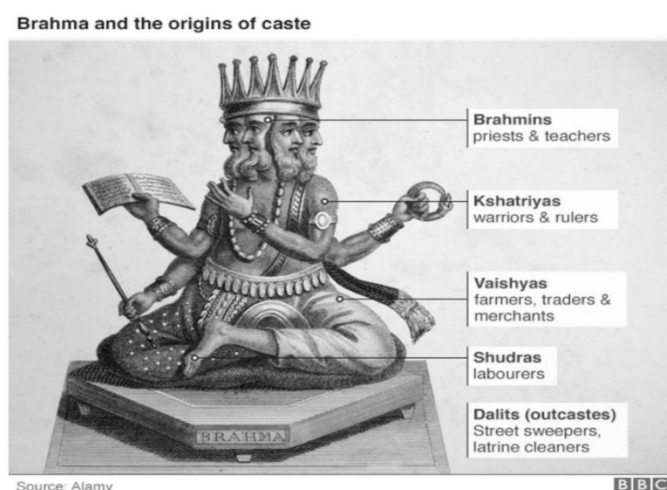
Selain itu (Ster, 2020) juga menjelaskan mengenai dampak dari GBV terhadap kesehatan fisik, mental, seksual, dan reproduksi perempuan. Hal ini terkait dengan peningkatan risiko cedera, depresi, gangguan kecemasan, kehamilan yang tidak direncanakan, infeksi menular seksual, HIV dan banyak masalah kesehatan lainnya. Menurut (Council of Europe, 2019) GBV ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan hal ini merupakan bentuk serangan terhadap martabat manusia serta merampas hak kemanusiaan. Kemudian I. Series et al., (2020) menjelaskan GBV sebagai pelanggaran HAM, dikarenakan perempuan di semua negara, tanpa memandang status, kelas, usia, kasta atau agama, mengalami kekerasan di hampir semua bidang kehidupan, baik di rumah, sekolah, di tempat kerja, di jalan, di lembaga pemerintah, di saat konflik atau pun disaat krisis. Berkaitan dengan hal tersebut GBV sebagai pelanggaran HAM (coe.int, 2022a) melansir bahwa untuk langkah memerangi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, PBB mengadopsi instrument dan langkah-langkah khusus dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Selain itu (coe.int, 2022b) juga melansir mengenai GBV sebagai isu HAM dan kesetaraan gender yang juga ditangani oleh instrumen HAM seperti Konvensi Eropa tentang HAM dan Piagam Sosial Eropa.

Kekerasan berbasis gender tidak hanya menjadi perhatian global tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan ini merupakan salah satu penghambat utama

pencapaian kesetaraan gender. Penyebab terjadinya GBV ini berbeda-beda, kemungkinan besar, penyebab utamanya adalah kekerasan yang didasarkan pada ketidaksetaraan dan diskriminasi kekuasaan berbasis gender (Isek, 2020). Sedangkan menurut (Coe.int, 2022) penyebab GBV ini didasarkan pada ketidakseimbangan kekuasaan dan dilakukan dengan maksud untuk memperlakukan dan membuat seseorang atau sekelompok orang merasa rendah diri atau tersubordinasi. Ketidakseimbangan kekuasaan tersebut didasarkan pada perasaan superioritas.

(Vpva.rutgers.edu, 2022) rasa kekuasaan atau pun kendali atas rasa kekuasaan tersebut digunakan pelaku untuk mengendalikan korban, (Coe.int, 2022) jenis kekerasan ini mengakar dan struktur sosial, budaya, norma dan nilai yang mengatur masyarakat, (Forbesmewett & McCulloch, 2015) dan struktur sosial yang mengakar ini dipertahankan dalam pengaturan budaya yang berbeda dengan berbagai kerentanan yang saling bersinggungan yang mencakup ras, kelas serta gender.

Stratifikasi Sosial Berdasarkan Kasta di India



Gambar 4.2 : stratifikasi sosial (kasta) masyarakat India.

Sumber : <https://www.bbc.com/news/world-asia-india>, di akses pada 17 Juni 2022

Gambar di atas merupakan gambar stratifikasi sosial masyarakat India atau tingkatan sistem kasta. Menurut Hindi & Sabha, (2015) sistem kasta merupakan salah satu jenis sistem stratifikasi sosial, yang sifatnya turun temurun, dan ditemukan di beberapa budaya. (Gov.uk, 2021) Di puncak hierarki atau bagian kepala adalah para brahmana yang sebagian besar adalah guru dan intelektual yang diyakini dari kepala brahmana. Ksatria dari tangan atau para pejuang dan penguasa. Waisya atau para pedagang yang diciptakan dari pahanya. Dibagian bawah adalah sudra yang datang dari kaki brahmana dan melakukan semua pekerjaan kasar. Di luar sistem kasta Hindu ini ialah Dalit atau yang tak tersentuh.

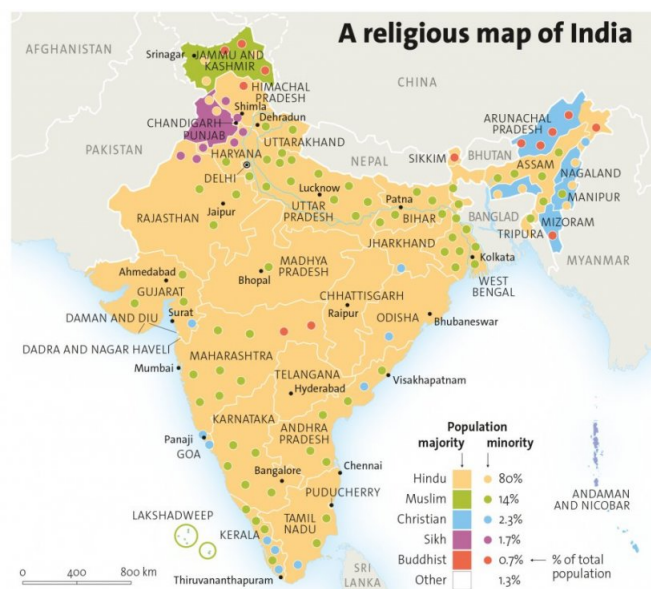
Berkaitan dengan sistem kasta Sabharwal & Sonalkar, (2015) menjelaskan bahwa menurut hierarki kasta Hindu, ada empat kasta yaitu Brahmana (kasta pendeta), Ksatria (prajurit),

Waisya (pedagang) dan Sudra (pekerja kasar). Sedangkan untuk orang – orang yang lahir di luar dan di bawah sistem kasta disebut sebagai "tak tersentuh" atau Dalit. Dalit adalah orang-orang yang secara tradisional dipandang rendah sebagai "tak tersentuh" atau *untouchable*. Kasta Dalit biasanya dikaitkan dengan pekerjaan yang dianggap tidak murni secara ritual, seperti pekerjaan yang berhubungan dengan pembersihan, toilet, drainase, limbah dan bangkai (Selvin, 2018). Kemudian (Jain, 2021) juga turut menjelaskan mengenai bagian-bagian sub kasta yaitu: (1.) Brahmana memegang posisi tertinggi dalam sistem kasta. (2.) Kshatriya berasal dari kata 'Kshatra' yang berarti aturan atau otoritas. (3.) Waisya adalah pedagang dan tugas kasta waisya yaitu untuk memastikan kemakmuran bagi kasta atas. Walaupun waisya dianggap lemah secara sosial di masyarakat, namun waisya kuat secara ekonomi karena menguasai perdagangan dan pasar. (4.) Sudra adalah buruh yang hanya bekerja untuk orang lain sebagai pelayan atau buruh.

(Athar Khan, 2019), menyampaikan bahwa stratifikasi sosial yang berdasarkan sistem kasta di India ini merupakan salah satu bentuk dari ketimpangan. Anggota masyarakat India mengatur satu sama lain dalam kategori superioritas, inferioritas, dan kesetaraan. Dengan kata lain, stratifikasi adalah proses diferensiasi di mana beberapa orang memperoleh peringkat lebih tinggi sementara beberapa lebih rendah. Selain itu, membagi masyarakat India ke dalam berbagai tingkatan dan lapisan. Ini menciptakan hierarki kelompok tertentu yang memiliki gaya hidup berbeda. Demikian pula, masyarakat India membuat stratifikasi berdasarkan kasta, kelas, dan gender. Pendapat Athar Khan sama hal yang disampaikan oleh (Kumar & Gautam, 2015) bahwa ketimpangan ini merupakan inti dari sistem kasta.

D. Kumar & Gautam (2015) juga menyampaikan bahwa sistem kasta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Hindu. Sistem kasta ini sudah ada selama berabad-abad, dan itu akan tetap bersama masyarakat Hindu. H. R. Council & Asia (2022) menganggap bahwa pembagian masyarakat menjadi kasta adalah fenomena global yang tidak secara eksklusif dipraktikkan dalam agama atau sistem kepercayaan tertentu. Di Asia Selatan, diskriminasi kasta secara tradisional berakar pada sistem kasta Hindu. Namun (Tiwari, 2012) menganggap bahwa sistem kasta ini tidak terbatas pada orang Hindu saja, karena ada kasta yang berbeda di antara umat Islam dan juga di beberapa tempat di India, di antara orang kristen. Tetapi sistem kasta yang paling kaku, lazim dan universal ada di antara umat Hindu yang merupakan 80% dari populasi. Dari penjelasan Tiwari tersebut dibuktikan dengan kondisi umat islam dan kristen yang dilansir oleh (Christophe Jaffrelot, 2022) bahwa dalit muslim dan dalit kristen ini sama-sama terpengaruh oleh diskriminasi kasta seperti halnya kaum dalit hindu. (Jayakumar, 2020) Pada tahun 2008 tepatnya pada bulan agustus terjadi pembantaian umat kristen yang berada di wilayah Kandhamal. Menurut laporan pengadilan rakyat nasional lebih dari 232 gereja dihancurkan dan lebih dari 39 orang kristen terbunuh dan 40 wanita dilaporkan diserang secara seksual. Pada wilayah Kandhamal umat kristen membentuk siekitar 20% dari populasi dan siebagian besar dari dalit dan adivasi. Pada tahun 2019 *Evangelica Fellowship of India* (EFI) mendokumentasikan 366 kasus kekerasan terhadap umat kristen. Umat kristen dalit merupakan mayoritas korban kekerasan

agama terutama dalam bentuk fisik. Pada dasarnya ajaran islam tidak mengenal kasta, dan lebih mementingkan kesetaraan antar sesama umat. (Biswas, 2016) melansir bahwa 75% dari populasi muslim India yaitu muslim dalit. Tidak hanya hindu dalit atau kristen dalit saja yang mengalami diskriminasi, muslim dalit juga mengalami diskriminasi. Misalnya saja muslim dalit tidak diperbolehkan menguburkan orang mati ditanah pemakaman kasta atas.



Gambar 4.3 : Persebaran agama di India

Berdasarkan gambar peta di atas, India adalah negara mayoritas Hindu, dengan hampir 80% penduduknya menganut agama Hindu. Data sensus 2011 memperkirakan minoritas agama mencapai lebih dari 20% dari populasi (sekitar 200 juta). Populasi India pada tahun 2021 diperkirakan lebih dari 1,3 miliar, yang berarti bahwa yang menganut agama minoritas sekarang dapat mencapai 270 juta. Minoritas agama terbesar, sebagaimana tercatat dalam sensus 2011, adalah: - Muslim (sekitar 14,2% dari populasi), yang tinggal di seluruh India, tetapi khususnya di 3 negara bagian Uttar Pradesh, Benggala Barat dan Bihar - Kristen (sekitar 2,3% populasi), yang sebagian besar tinggal di negara bagian Nagaland, Mizoram, Meghalaya, dan Manipur di timur laut serta di negara bagian Arunachal Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Goa, dan Andaman dan Nicobar Islands. - Sikh (sekitar 1,7% dari populasi); yang sebagian besar tinggal di negara bagian Punjab serta di Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, dan Uttarakhand, dan; - Buddha (kurang dari 1%); yang sebagian besar tinggal di negara bagian Maharashtra, Sikkim, Arunachal Pradesh dan Mizoram (Gov.uk, 2021).

Angka-angka dari sensus 2011 mengkonfirmasi bahwa ada lebih dari 200 juta Kasta Terdaftar (istilah resmi untuk Dalit Hindu, Sikh dan Buddha) di India. Jumlah total Dalit mungkin jauh lebih tinggi karena Dalit Muslim dan Kristen tidak termasuk dalam angka-angka ini. Jumlah Kasta Terdaftar (SC) di India meningkat 35 juta selama dekade mulai dari

2001 hingga 2011. Ini berarti bahwa sekarang ada 201,4 juta orang Hindu, Sikh, dan Buddha Dalit di Negara ini. Kasta Terjadwal India didistribusikan di 31 negara bagian dan wilayah persatuan. Negara bagian dengan jumlah SC tertinggi adalah Uttar Pradesh, dengan lebih dari 40 juta, dan Benggala Barat dengan sekitar 20 juta. Punjab yang kurang padat penduduknya adalah negara bagian dengan proporsi SC tertinggi terhadap total populasinya – 31,9 persen. Sementara 200 juta SC merupakan proporsi yang signifikan dari populasi India, jumlah total, jika tidak resmi, jumlah Dalit di negara itu hampir pasti jauh lebih tinggi, karena Dalit Kristen dan Muslim tidak terdaftar sebagai 'Kasta Terjadwal (Idsn.org, 2013).

***Census Of India 2011/ Scheduled Castes (SCS)**

Top 5 States/UTs		Bottom 5 States/UTs	
Punjab	31.9%	Mizoram	0.1%
Himachal Pradesh	25.2%	Meghalaya	0.6%
West Bengal	23.5%	Goa	1.7%
Uttar Pradesh	20.7%	Dadra & Nagar Haveli	1.8%
Haryana	20.2%	Daman & Diu	2.5%

Gambar 4.4: Jumlah populasi SCs (*Scheduled Castes*) / kasta terjawal berdasarkan sensus tahun 2011

Sumber: (Chandramouli, 2013)

Berdasarkan tabel sensus 2011 diatas terdapat lima negara bagian dengan jumlah populasi (*Scheduled Castes*) SCs atau kasta terjawal tertinggi yaitu Punjab 31,9%, Himachal Pradesh 25,2%, Bengala Barat 23,5%, Uttar Pradesh 20,7%, dan Haryana 20,2%. Sedangkan lima negara dengan jumlah populasi *Scheduled Castes*) SCs atau kasta terjawal sedikit yaitu Mizoram 0,1%, Meghalaya 0,6%, Goa 1,7%, Dadra & Nagar 1,8%, Haveli 1,5%, dan Daman & Diu ,5%. (Sivakumar, 2013) Pulau Nagaland Lakshwadeep, Andaman, dan Nicobar tidak memiliki kasta terjadwal diantara populasi kasta terjadwal. Sankaran et al, (2017) menjelaskan di India modern, pemerintah India memperkenalkan skema kategorisasi yaitu : Kasta maju yang merupakan kelompok kasta tinggi (FC), kasta tak tersentuh dikategorikan sebagai kasta terjadwal (SC), suku terbelakang dikategorikan sebagai suku terjadwal (ST), dan kasta kurang beruntung sebagai kasta terbelakang lainnya (OBC).

Feminisme dan Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Patriarki

Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi. Gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki (Fakih, 1996). Dalam perkembangannya feminisme telah menjadi lebih dari sekedar usaha untuk memperjuangkan persamaan hak. Kini feminisme

berupaya keras untuk memperjuangkan martabat dan membebaskan perempuan dari belenggu struktur atau sistem yang eksploitatif dan subordinatif (Asrudin, 2009). Namun Bunjun (2010) menerangkan bahwa feminisme secara tradisional telah didefinisikan sebagai kepercayaan pada kesetaraan politik, sosial, hukum dan ekonomi dari semua perempuan. Hal tersebut dipertegas lagi oleh A. Hamzah (2019) mengatakan bahwa teori feminisme ini berfokus pada situasi perempuan yang problematis, dimana masalah yang dominan muncul dalam isu-isu feminisme biasanya terjadi dalam sistem masyarakat patriarkis yang cenderung mendominasi kaum perempuan.

Asrudin (2009) mengatakan bahwa permasalahan perempuan tidak dapat dipisahkan dari persoalan ideologi, struktur dan kultur, yang dimana ketiganya ini saling terkait mengukuhkan situasi yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Pettiford, (2019) menjelaskan bahwa dalam teori feminis kontemporer perhatian tidak lagi sepenuhnya dipusatkan pada kehidupan perempuan, tetapi mencakup juga suatu analisis gender. Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Gender dan Feminisme ; pemahaman awal kritik sastra feminisme” Rohkmansyah (2016) menjelaskan bahwa gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. (Smith, 2018) mengatakan bahwa identitas gender ini juga dijiwai oleh kekuasaan, khususnya kekuasaan patriarki identitas gender yang dikonstruksi secara sosial juga menentukan distribusi kekuasaan, yang berdampak pada posisi perempuan dalam politik global.

Menurut (Ross, 2017) konsep interseksionalitas menggambarkan pertemuan penindasan, tidak hanya menyebutkan identitas yang beragam. Feminisme interseksional ini menjelaskan bahwa masalah perempuan berkaitan dengan kelas sosial, kasta, warna kulit, ras, identitas interseksional dan budaya. (Bunjun, 2010) interseksionalitas menggerakkan teori feminis di luar satu hubungan kekuasaan tunggal, misalnya, patriarki, untuk lebih sepenuhnya menjelaskan kompleksitas sistem yang membentuk keragaman realitas hidup perempuan. Sedangkan Dwivedi & Sachdeva (2019) menjelaskan bahwa perempuan dapat menghadapi diskriminasi ekstrim karena pola pikir historis, dan diskriminatif dalam masyarakat.

Namun (UNFPA, 2019) menerangkan bahwa interseksional ini merupakan kerangka kerja untuk memahami bahwa orang mengalami tumpang tindih atau bersinggungan dengan bentuk-bentuk penindasan, diskriminasi dan marginalisasi berdasarkan identitas mereka yang hidup berdampingan (misalnya, ketidaksetaraan berdasarkan gender dan/atau etnis). Seperti halnya yang dialami oleh perempuan kasta dalit dan diskriminasi ganda perempuan dalit di India hidup dalam masyarakat yang terbagi menurut garis kasta dan masyarakat yang sangat patriarki (Mosse, 2018). Perempuan dalit menghadapi diskriminasi tiga kali lipat karena tidak tersentuh “*untouchable*”.

Perempuan dalit sering digambarkan sebagai yang tertindas dari yang tertindas, kekerasan dan penindasan terhadap perempuan dalit ini menjadi lebih kompleks dan beragam bahkan dibandingkan dengan laki-laki Dalit (A. A. Hamzah, 2020). Para perempuan ini terlihat

mengalami tingkat kekerasan yang tinggi di dalam dan diluar rumah. Dalam hal praktik adat dan hukum pribadi, perempuan dalit jauh dari setara dengan laki-laki dalit. Perempuan dalit sangat terpinggirkan karena praktik tak tersentuh dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya (Wed.nic.in, 2015).

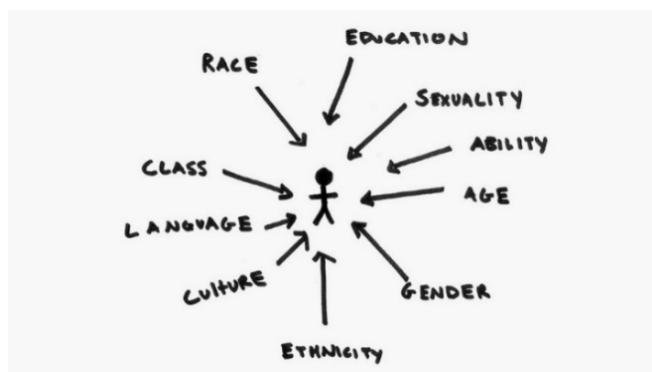
Seperti yang dilansir oleh BBC, (2020) bahwa perempuan-perempuan dari kasta dalit ini, yang merupakan 16% dari total populasi perempuan India, menghadapi "beban berganda" mulai dari bias gender, diskriminasi kasta dan perampasan hak ekonomi. Perempuan dalit ini merupakan korban dari budaya, struktur, dan institusi yang menindas, baik secara eksternal maupun internal. Hal tersebut termanifestasi dalam kekerasan yang terus dialami oleh perempuan Dalit. Selain itu perempuan dalit dianggap sebagai target utama dalam kekerasan seksual dan kejahatan lainnya karena para pelaku cenderung lolos begitu saja. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses keadilan bagi perempuan kasta dalit. (Pathak, 2021) Dari kasus tersebut merupakan bentuk dari persimpangan diskriminasi gender dan kasta hasil dari persamaan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak seimbang. Beberapa manifestasi kejahatan yang dialami perempuan dalit antaralain: kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi dan kekerasan berbasis kasta, kematian terkiat mahar, kejahatan atas nama kehormatan, pelecehan, pemaksaan atau pernikahan dini, perampasan akses terhadap air dan sanitasi, pelanggaran hak seksual dan reproduksi. Manifestasi kekerasan tersebut berakar pada berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan, dan hal tersebut sangat terkait dengan kondisi situasi sosial dan ekonomi (Ohchr.org, 2013b).

Di India, sejak lama perempuan dianggap sebagai bagian masyarakat yang tertindas dan suara perempuan atau pun kontribusinya diabaikan. Misalnya saja seperti jika anak laki-laki lahir, kelahirannya pun dirayakan, sedangkan anak perempuan yang lahir, kelahirannya tidak dirayakan. Anak laki-laki didorong untuk menjadi tangguh dan ramah tetapi anak perempuan didorong untuk tinggal di rumah dan malu. Semua perbedaan ini adalah perbedaan gender dan itu diciptakan oleh masyarakat (N.M.P. Verma, 2021). Hal tersebut merupakan pola budaya, khususnya efek berbahaya dari praktik tradisional atau kebijakan tertentu dan semua tindakan ekstrimisme yang terkait dengan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama yang diberikan kepada perempuan dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, atau pun dalam masyarakat (UN Women, 2014).

Perempuan Kasta Dalit dalam Perspektif Feminisme Interseksional

Interseksionalitas pertama kali diciptakan oleh Profesor Kimberlé Crenshaw pada tahun 1989. Kata interseksionalitas berarti tumpang tindih atau konteks ini merujuk pada tumpang tindih pertemuan identitas. Pada pendekatan interseksionalitas ini menunjukkan bagaimana identitas sosial orang dapat tumpang tindih, dan dapat menciptakan diskriminasi yang rumit (Unwomen.org, 2020). Menurut Taylor, (2019) Interseksional ini merupakan konsep bahwa semua penindasan saling terkait. Interseksionalitas disini menerangkan bahwa setiap orang

dapat mengalami terpinggirkan, diskriminasi atau penindasan baik itu dalam jenis kelamin, ras, kelas, orientasi seksual, kemampuan fisik, agama, suku, budaya, lain-lain.



Gambar 4.5 : Gambaran tumpang tindih dari interseksional

Sumber : <https://iwda.org.au/what-does-intersectional-feminism-actually-mean/>

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, secara umum satu perempuan tidak hanya menerima satu faktor yang menyebabkan kejahatan. Faktor seperti diatas dapat memfasilitasi ketidakadilan,

subordinasi, dan diskriminasi, berdasarkan kelompok etnis,ras, atau agama tertentu, klasisme berdasarkan status ekonomi tertentu, dan juga seksisme berdasarkan gender tertentu. Diskriminasi terhadap perempuan dengan faktor diatas dapat bertumpuk atau bersinggungan (Arivia, 2016). Mengenai fenomena diskriminasi interseksional ini juga ditemukan di India dan sebagian besar penerimanya adalah perempuan Dalit. Perempuan Dalit terperangkap dalam masyarakat yang sangat patriarki berbasis kasta. Selain itu peminggiran perempuan ini tidak hanya terjadi atas dasar gender tetapi juga karena diskriminasi social terhadap kaum Dalit. Berbagai lapisan diskriminasi ini menggabungkan dan meningkatkan kerentanan perempuan Dalit terhadap berbagai bentuk penindasan (Kumar, 2022).

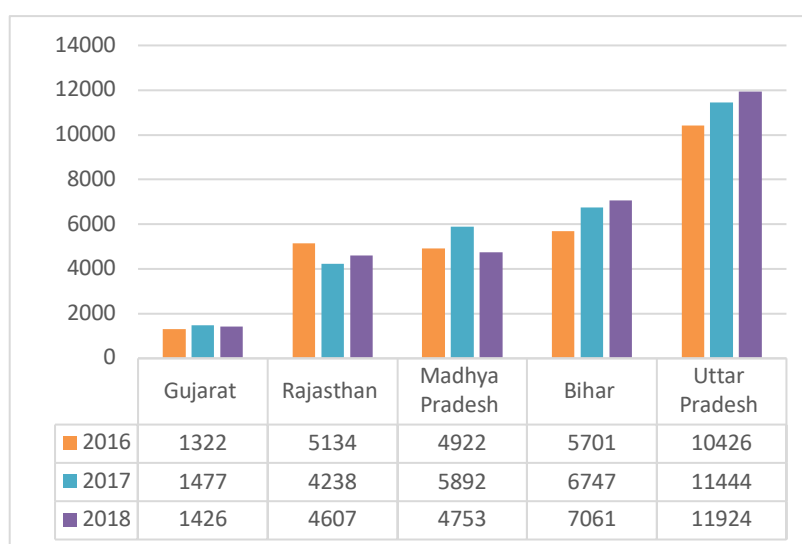
Menurut (Sabharwal & Sonalkar, 2015) menyebutkan tantangan utama yang dihadapi perempuan dalit, Antara lain:

- a. Diskriminasi berbasis kasta dan tak tersentuh
- b. Kejahatan / kekerasan seksual, pembunuhan
- c. Pelacuran Kuil
- d. Diskriminasi gender
- e. Keterbatasan ekonomi
- f. Kesehatan yang buruk

Berbagai bentuk lapisan permasalahan mengenai perempuan kasta dalit tersebut kemudian di pertegas lagi oleh (Matter & Perspectives, 2012) bahwa masyarakat India yang sangat berlapis-lapis dengan adanya perbedaan kelas, kasta, perkotaan dan pedesaan, ini berarti

ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan berbeda karena persimpangan dua atau lebih kategori ataupun faktor yang lain. Sedangkan kekerasan berbasis gender GBV di India, seringkali bukan hanya kejahatan terkait gender saja, tetapi juga efek gabungan dari berbagai faktor lain termasuk kasta, kelas dan agama.

Arya (2020) berpendapat bahwa perempuan dalit yang berada di bawah hierarki kasta menderita dua kali lipat, tidak hanya penindasan hak (ekonomi dan pendidikan) dan kebebasan individu sebagai ‘tak tersentuh’, tetapi juga sebagai perempuan kasta ‘bawah’. Dengan demikian perempuan kasta dalit menghadapi kekerasan interseksional. Lalu (Iwda.org, 2018) juga menjelaskan bahwa interseksional ini merupakan berbagai bentuk diskriminasi yang bergabung sehingga tumpang tindih dengan permasalahan yang lain. Dimana permasalahan yang dialami perempuan kasta dalit ini tidak hanya diskriminasi kasta saja, bahkan juga mengalami berbagai bentuk penindasan.



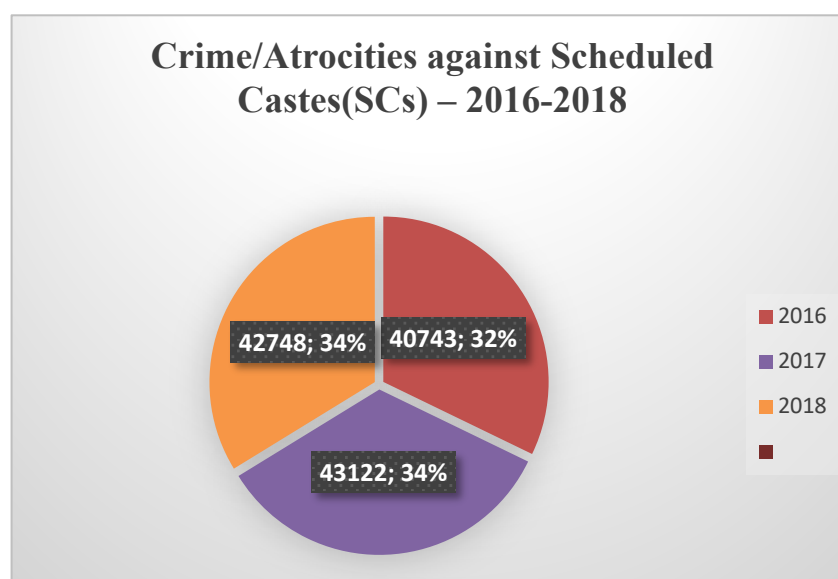
Gambar grafik 4.6 : Data jumlah kasus kejahatan di India, Kejahatan terhadap Kasta Terjadwal (SC) di beberapa negara bagian, tahun 2016-2018

Sumber : <https://ncrb.gov.in/en> diakses pada 1 Juli 2022

Biro Catatan Kejahatan Nasional (*National Crime Report Berau*) NCRB mencatat kasus kejahatan terhadap kasta terjadwal (SC) atau kasta Dalit tahun 2016 - 2018. Tahun 2016 di Gujarat jumlah kasus kejahatan sekitar 1.322 kasus, tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 1.477 kasus, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 sekitar 1.426 kasus. Tahun 2016 jumlah kasus kejahatan di Rajasthan sekitar 5.134 kasus, Madhya Pradesh 4.922 kasus, Bihar 5.701, dan tertinggi berada pada Uttar Pradesh 10.426. Pada tahun 2017 Rajasthan mengalami penurunan sekitar 4.238 kasus, Madhya Pradesh meningkat menjadi 5.892 kasus, Bihar meningkat menjadi 6.747 kasus, serta Uttar Pradesh juga mengalami

peningkatan sebesar 11.444 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 Rajasthan mengalami peningkatan menjadi 4.607 kasus, Madya Pradesh menurun menjadi 4.753 kasus, Bihar meningkat menjadi 7.061 kasus, dan Uttar Pradesh juga mengalami peningkatan sebesar 11.924 kasus.

Berkaitan dengan jumlah kasus kejahatan terhadap kasta terjadwal diatas (Nikhil Rampal, 2022) melaporkan jumlah kasus kejahatan terhadap Dalit di Uttar Pradesh 13.146 kasus, yang berjumlah hampir seperempat dari total insiden semacam itu pada tahun 2021. Setelah itu adalah Rajasthan (7.524), Madhya Pradesh (7.214), dan Bihar (5.842). Dari negara bagian ini, Uttar Pradesh, Rajasthan, dan Madya Pradesh jumlah kasus lebih tinggi daripada tahun 2020, tetapi Bihar mengalami penurunan. Berkaitan dengan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan NCRB diatas, yang mengalami peningkatan atau pun penurun namun sedikit, (Saha, 2021) menjelaskan bahwa 99% kasus kekerasan tidak dilaporkan. Penyebabnya adalah rasa malu, stigma, dan kurangnya akses terhadap mekanisme hukum. Kemudian (Equalitynow.org, 2020) pada tahun 2018 secara nasional hanya sekitar 6% dari total kasus perkosaan yang diselidiki oleh polisi yang diselesaikan dengan laporan akhir sebagai palsu.



Gambar 4.7: data jumlah kasus kejahatan terhadap SCs tahun 2016-2018

Sumber : (National Crime Records Bureau, 2019)

Data diatas menunjukkan jumlah kasus kejahatan terhadap (*Scheduled Castes*) SCs / kasta terjadwal diseluruh negara bagian India dari tahun 2016-2018. Jumlah kasus kejahatan pada tahun 2016 sekitar 40.743 kasus, 2017 sekitar 43.122 kasus, dan pada tahun 2018 sekitar 42.748 kasus.

UN WOMEN dalam Menangani GBV

Di India UN *WOMEN* bekerja erat dengan pemerintah India dan berkolaborasi dengan sistem PBB dan masyarakat sipil untuk mencapai kesetaraan gender. Program programnya berfokus pada penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, perencanaan dan penganggaran nasional yang responsif gender, serta mengadvokasi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di semua sektor (UN WOMEN, 2021).

Berdasarkan pernyataan dari Hurd (2011), dan Sumber Daya. Maka peranan UN Women dapat diklasifikasikan kedalam tiga perspektif tersebut, antara lain:

a. Organisasi internasional sebagai aktor

Organisasi internasional terkadang menjadi aktor dalam dunia politik, dimana dibentuk oleh hukum internasional sebagai entitas independen. UN *Women* mengimplementasikan program (dan proyek komponennya) di tingkat negara, multi-negara, dan regional melalui mitra pelaksana, yang mencakup entitas pemerintah, organisasi non pemerintah (LSM), badan-badan PBB, organisasi antar pemerintah non-PBB, dan UN *Women* (pelaksanaan langsung). Program dikembangkan melalui proses konsultatif dengan mitra dan pemangku kepentingan di tingkat negara, multi-negara atau regional, tergantung pada cakupan geografisnya (UN Women, 2022).

Dengan adanya mitra pelaksana UN *Women* diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari diskriminasi, kesetaraan gender serta perempuan dan anak perempuan diharapkan dapat memimpin perubahan (Unwomen.org, 2021a). Kesepakatan penuh dari mitra pelaksana sangat penting dalam proses ini. Sebuah program harus sejalan dengan rencana strategis UN *Women* untuk mendapatkan persetujuan akhir dari Direktur Eksekutif UN *Women* (UN Women, 2022). Mitra-mitra UN *Women* antara lain : mitra pemerintah, mekanisme nasional, masyarakat sipil, kolaborasi media, komite nasional untuk perempuan PBB, ikatan alumni wanita PBB (Unwomen.org, 2021b).

UN-Women juga bekerja sama dengan UNCT dan badan-badan sistem PBB untuk memprioritaskan kesetaraan gender dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan PBB yang akan datang di India (2018-22); percontohan Sistem PBB Rencana Aksi Luas untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN-SWAP) di tingkat nasional; dan memastikan implementasi kerangka pembangunan berkelanjutan yang responsif gender sebagai bagian dari Fasilitas Pelaksanaan SDG UNCT, yang memberikan dukungan kepada pemerintah negara bagian dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kerangka perencanaan untuk SDGs (Delhi & Representative, 2017). Mengatasi Ketimpangan, Kerentanan dan Membangun Ketahanan, upaya berkelanjutan UN-*Women* untuk memperkuat lembaga-lembaga perempuan, kepemimpinan dan intervensi strategis, untuk memastikan bahwa suara Dalit (Kasta Terjadwal), Suku (Suku Terjadwal) dan agama

minoritas didengar dan direfleksikan dalam pembuatan kebijakan (Delhi & Representative, 2017).

Maka dalam hal ini UN *WOMEN* bekerja untuk mengembangkan dan menegakkan standar dan menciptakan lingkungan dimana setiap perempuan dan anak perempuan dapat menggunakan hak asasinya:

1. Menyediakan pinjaman infrastruktur, dan fasilitas pasar yang optimal bagi perempuan dalit, koperasi dan kelompok, serta menjamin pemasaran produknya.
2. Penyelesaian kasus hukum yang cepat akan mendorong perempuan untuk mencari keadilan secara pro aktif.
3. Tetapkan target untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan ibu dan nutrisi anak perempuan.
4. Seleksi proaktif perempuan dalit sebagai penyedia layanan atau pekerja penghubung kesehatan, dilatih dan dikerahkan untuk mengelola skema dan program yang dimaksud. Program pelatihan dan penyadaran bagi perwakilan perempuan dalit dilembaga Panchayati Raj.
5. Inklusi dan kesehatan perempuan dalit dengan langkah-langkah yang lebih proaktif untuk meningkatkan partisipasi dan retensi di setiap jenjang pendidikan, terutama di pendidikan tinggi.
6. Alokasi dana tetap sebesar 50% untuk perempuan dalit (NCDHR, 2021).

Kantor negara PBB-*Women* India beroperasi dengan anggaran sekitar USD 9,2 juta pada tahun 2017. Fokus program ditetapkan pada advokasi kebijakan, dukungan teknis dan pengembangan kapasitas pemerintah mitra dan CSO. Saran kebijakan tingkat tinggi dan dukungan teknis untuk pengarusutamaan gender diberikan kepada enam Kementerian Pusat. Pelatihan/lokakarya pengembangan kapasitas dan demonstrasi percontohan lebih lanjut diluncurkan di tingkat sub-nasional, menargetkan pejabat pemerintah, perwakilan OMS, dan perempuan di tingkat komunitas di negara bagian; dengan dukungan nasihat teknis dan kebijakan langsung yang diberikan kepada sembilan Pemerintah Negara Bagian oleh *UNWomen* sebagaimana disebutkan di atas (Delhi & Representative, 2017).

UN *Women* India juga turut mendukung pembentukan program pencegahan primer yang komprehensif untuk menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan etnis minoritas dan meningkatkan pelaksanaan kekerasan menentang hukum dan kebijakan perempuan (Report, 2013). Selain itu UN Women juga turut menjalin kemitraan strategis dengan enam Kementerian Pusat, yaitu : Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak (MWCD); - Kementerian Pembangunan Pedesaan (MoRD); - Kementerian Panchayati Raj (MoPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Energi Baru dan Terbarukan (Delhi & Representative, 2017). *National Institution for Transforming India* (NITI) Aayog adalah kebijakan utama pemerintah India, yang memberikan masukan arah dan

kebijakan pada semua hal termasuk urusan perempuan dan SDG. Pemerintah India juga telah menetapkan Badan Hukum yaitu Komisi Nasional untuk perempuan di New Delhi yang mandatnya adalah untuk meninjau perlindungan Konstitusi dan Hukum untuk perempuan, merekomendasikan langkah-langkah legislatif perbaikan, memfasilitasi penyelesaian keluhan dan memberi saran kepada pemerintah tentang semua masalah kebijakan yang mempengaruhi perempuan (*India's Report: Beijing Declaration and Platform for Action*, 2019).

b. Organisasi internasional sebagai Forum

Organisasi internasional sebagai Forum yaitu sebagai sebagai tempat pertemuan di mana negara mendiskusikan kepentingan dan masalah yang menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya pelapor khusus PBB meminta permintaan kunjungan ke berbagai negara termasuk India. Beberapa pelapor khusus telah meminta kunjungan ke negara India untuk status quo pada permintaan yang tertunda dan kunjungan yang dikonfirmasi, pemegang mandat melakukan kunjungan negara untuk menilai situasi hak asasi manusia di tingkat nasional. Atas permintaan pemegang mandat, pemerintah akan mengirimkan undangan untuk misi pencarian fakta. Beberapa negara telah mengeluarkan undangan berdiri termasuk India, yang berarti pada prinsipnya negara telah siap menerima kunjungan dari pemegang mandat tematik manapun (Ohchr.org, 2022).

Pada 22 April hingga 26 April 2017 Dewan Eksekutif Wanita PBB melakukan kunjungan lapangan ke India. Kunjungan lapangan Dewan Eksekutif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang pekerjaan UN-Women di tingkat negara dan kerjasamanya dengan Pemerintah India. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan wawasan tentang tingkat dan cara kerja sama di antara mitra pembangunan yang berkolaborasi dengan UN-Women di India, termasuk kerjasama antar lembaga serta kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan pemangku kepentingan lainnya (Delhi & Representative, 2017).

Pelapor khusus PBB melaporkan bahwa banyak sekali manifestasi kekerasan berbasis gender, dan rata-rata korbanya dialami oleh perempuan dan anak perempuan. banyak kekerasan terjadi diberbagai bidang kehidupan, termasuk rumah, tempat umum, atau institusi. Kekerasan yang dialami perempuan ini sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender dan diskriminasi. Kekerasan tersebut bermanifestasi dalam berbagai cara dan bentuk berdasarkan berbagai faktor termasuk lokasi geografisnya (Ohchr.org, 2013). Ketidaksetaraan ini lebih menonjol lagi bagi perempuan ketika ada Sebuah laporan utama dari UN Women yang menunjukkan bahwa seorang perempuan muda dari rumah tangga pedesaan yang miskin di India besar kemungkinan dipaksa menikah di bawah umur dan kemungkinan besar perempuan tidak pernah bersekolah atau putus sekolah dibandingkan perempuan dari daerah perkotaan yang lebih kaya. Laporan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa

rata-rata wanita Dalit di India meninggal 14,6 tahun lebih muda daripada wanita dari kasta yang lebih tinggi (Ohchr.org, 2022).

c. Organisasi internasional sebagai sumber daya

Sebagai sumber daya yang dimasuk disini yaitu sumber daya politik yang digunakan negara untuk menjangkau tujuannya, baik domestik maupun internasional. Hal tersebut dapat dilihat pada perwakilan pemerintah tingkat tinggi di tingkat nasional dan Negara bagian di India mencatat bahwa pemerintah India bermaksud untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi Pemerintah India '*Sab ka Saath, Sab ka Vikaas*' (Upaya Kolektif untuk Pembangunan Inklusif). Perwakilan pemerintah mengidentifikasi perlunya dukungan untuk memperkuat statistik dan pengumpulan gender data terpilah menurut jenis kelamin; advokasi dan peningkatan kapasitas menuju implementasi yang efektif dari program (misalnya tentang mobilitas perempuan dan keselamatan tempat kerja; berbagai aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (misalnya, mempromosikan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan) (Delhi & Representative, 2017).

Fokus utama yang perlu dilakukan di India adalah menggunakan pendidikan untuk memutus siklus diskriminasi kasta bagi Dalit, serta memastikan perempuan didorong, didukung, dan diberi peluang positif untuk dapat bekerja (Childrenontheedge.org, 2018). Selain itu pada Januari 2017 UN Women mendukung pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan yang di sebut *Jugnu Clubs*, diseluruh perkebunan teh di Assam dengan tujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan di Assam. *Jugnu Club* merupakan bagian dari prakarsa pencegahan kekerasan perempuan PBB yang lebih luas di pedesaan Assam (Borgenproject.org, 2017).

Dengan dukungan UN *WOMEN* perempuan dan laki-laki di komunitas pedesaan negara bagian Assam di India telah menemukan cara baru untuk bekerja sama mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak di lingkungannya. Sebagai bagian dari program pencegahan, wanita PBB yang dikembangkan di distrik Udalgari di Assam, ratusan manajer perkebunan teh, petugas kesejahteraan, pekerja dan anggota *jugnu club* menerima pelatihan tentang pelecehan seksual India terhadap perempuan di tempat kerja, hak-hak perempuan, dan kewajiban hukum di sekitar kekerasan dalam rumah tangga dan pekerja anak (Unwomen.org, 2018).

Kolaborasi antara Pemerintah India dan UN-Women bekerja di enam bidang inti (Rencana Strategis 2014-17 antara lain (Delhi & Representative, 2017):

- a. Mempromosikan kepemimpinan perempuan dan pemerintahan yang responsif gender.
- b. Pemberdayaan ekonomi perempuan.

- c. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.
- d. Mempromosikan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam aksi perdamaian dan kemanusiaan
- e. Memperkuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- f. Proses antar-pemerintah.

Kesimpulan

GBV menjadi masalah utama dalam lingkup global, hal ini kebanyakan korban dari GBV adalah perempuan. kejahatan yang diterima perempuan ini tidak pandang bulu, entah itu anak kecil, remaja atau pun perempuan dewasa juga mengalami kejahatan. selain itu kejahatan yang perempuan terima tidak hanya berupa kejahatan fisik saja, kejahatan non-verbal pun turut mewarnai penderitaan perempuan. Perempuan kasta dalit ini mengalami kekerasan fisik, bahkan diskriminasi yang di dasarkan pada kastanya. Kasta yang sudah melekat pada perempuan dalit ini, berdampak dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya ekonomi termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan bahkan hukum. Kekerasan yang perempuan dalit alami ini sangat beragam dan kompleks. Ketimpangan demi ketimpangan masih merebak diantara masyarakat dalit. Jika seorang perempuan dalit melaporkan kejahatan yang dialami, pihak kepolisian pun terkadang enggan untuk melakukan penyelidikan karena korban berasal dari kasta dalit. Bahkan jika perempuan dalit mengalami kasus pelecehan atau pun pemerkosaan, korbannya pun diancam untuk dibunuh. Sudah banyak korban pembunuhan dan dimutilasi untuk menghilangkan jejak pelaku kejahatan. Jika di kaji mengenai isu-isu terhadap perempuan kasta dalit ini, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang perempuan dalit alami. Perempuan dalit ini seakan-akan sangat rendah, hal tersebut di buktikan dengan adanya pelacuran kuil, upah yang tidak dibayar bahkan dibayar pun dengan upah yang sangat rendah. Budaya patriarki dan ketimpangan gender juga turut mewarnai kejahatan, dan diskriminasi terhadap perempuan dalit. Hal inilah kenapa perempuan banyak mengalami tumpang tindih kekerasan.

Maka dalam ini *UN-Women* turut berperan mengatasi ketimpangan, dan membangun ketahanan, dengan melakukan upaya berkelanjutan *UN-Women* untuk memperkuat lembaga-lembaga perempuan, kepemimpinan dan intervensi strategis, untuk memastikan bahwa suara Dalit (Kasta Terjadwal), Suku (Suku Terjadwal) dan agama minoritas didengar dan direfleksikan dalam pembuatan kebijakan. Peran lain yang *UN-Women* lakukan yaitu *UN-Women* mendukung pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan yang di sebut *Jugnu Clubs*, diseluruh perkebunan teh di Assam dengan tujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Prioritas lainnya adalah mengakhiri kekerasan dalam segala bentuk, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga perdagangan manusia hingga kekerasan di tempat umum. Selain itu *UN-Women* juga turut mempromosikan, dan memantau kesetaraan gender, dengan fokus pada kekerasan terhadap perempuan kasta terjadwal.

Saran

Peneliti tujukan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan pembaruan terkait penelitian terhadap kasta dalit, gender atau pun feminisme sehingga bisa menambah wawasan dan temuan baru untuk peneliti berikutnya atau pun untuk pembaca. Berhubung ruang lingkup gender atau pun feminisme sangat luas dalam aspek kehidupan peneliti harapkan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti secara lebih luas lagi.

Referensi

- Anand, T. (2018). *A Brief Summary Of The Third Wave Of Feminism*. <https://feminisminindia.com/2018/04/27/brief-summary-third-wave-of-feminism/>
- Arivia, G. (2016). *Feminisme : sebuah kata hati*. PT Kompas Media Nusantara.
- Arya, S. (2020). Editorial Essay. *CASTE / A Global Journal on Social Exclusion*, 1(2), XI–XXIV. <https://doi.org/10.26812/caste.v1i2.235>
- Asrudin. (2009a). *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer)*. Graha Ilmu.
- Asrudin, M. J. S. dkk. (2009b). *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer)*. Graha Ilmu.
- Athar Khan. (2019). *Stratification of Indian Society*. 25 Agustus. <https://www.toppr.com/bytes/stratification-of-indian-society/>.
- BBC. (2017, May 15). *India kembali diguncang kasus perkosaan beramai-ramai*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39926455>
- BBC. (2018, April 2). *Eight dead in massive India caste protests*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-43616242>
- BBC. (2020, October 11). *India hadapi pemerkosaan terhadap sepuluh perempuan Dalit setiap hari, mereka jadi kelompok “yang paling tertindas” di dunia*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54430046>
- Berg, M. (2009). The Role of Inter- and NonGovernmental Organizaions. *Conventions, Treaties And Other Responses To Global Issues, II*, 107–130.
- Bhandari, M. P. (2019). *The Development of the International Organization (IO) and Organizational Sociology Theories and Perspectives . Part 2- Definitions and Types of IO*. 10–14. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6524>
- Bina B. Hanchinamani. (2001). Human Rights Abuses of Dalits in India. *Human Rights Brief*, 8(2), 17–20. <http://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief>
- Biswas, S. (2016). *Why are many Indian Muslims seen as untouchable?* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-36220329>
- Borgenproject.org. (2017). *VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ASSAM*. <https://borgenproject.org/tag/the-jugnu-clubs/>
- Bunjun, B. (2010). Feminist Organizations and Intersectionality: Contesting Hegemonic Feminism. *Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice*, 34(1991), 115–126. <http://journals.msvu.ca/index.php/atlantis/article/view/338>

- Burmeister, N. (2019). *International Organizations as Actors and Arenas in International Politics*.
- Center for Human Rights and Global Justice & Human Rights Watch. (2007). *Caste discrimination against Dalits or so-called untouchables in India*. February, 1–77.
- Chandramouli. (2013). *CENSUS OF INDIA 2011 RELEASE OF Scheduled Caste (SC) Scheduled Tribe (ST)*. April.
- childrenontheedge.org. (2017). *TACKLING CASTE DISCRIMINATION*. https://www.childrenontheedge.org/castediscrimination.html?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINIJ9CIIdQZENkj6sNnuj-VW1r9nIY2ZBHB7X_OagjNuBOcK_BDhOnmaAzJxoC-dQQAyD_BwE
- Childrenontheedge.org. (2018). *Supporting progress for Dalit women in Bihar State, India*. <https://www.childrenontheedge.org/lateststories/supporting-progress-for-dalit-women-in-bihar-state-india>
- Christophe Jaffrelot, P. V. (2022). The case for extending constitutional protections to Muslim and Christian Dalits. *Indianexpress.Com*. <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-case-for-extending-constitutional-protections-to-muslim-and-christian-dalits-7887277/>
- CNN. (2014a). *DISKRIMINASI KASTA Budaya Kasta di India, Budaya Pemerksaan*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140908170917-113-2763/budaya-kasta-di-india-budaya-pemerksaan>
- CNN. (2014b). *Kasta Dalit, Tak Diakui dan Dianggap Hina*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140908172724-113-2768/kasta-dalit-tak-diakui-dan-dianggap-hina>
- coe.int. (2022a). *Gender-based violence and human rights*. <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/gender-based-violence-and-human-rights>
- coe.int. (2022b). *Instruments adopted by the Council of Europe*. Instruments adopted by the Council of Europe
- Coe.int. (2022). *What is gender-based violence?* <https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls>
- Concern.net. (2021). *Gender Based Violence*. <https://www.concern.net/news/gender-based-violence-explained>
- Couderé, H. (2016). *India: Violence Against Dalits on the Rise*. <https://thediplomat.com/2016/05/india-violence-against-dalits-on-the-rise/>
- Council, H. R., & Asia, S. (2022). *Recommendations for the 49 th Regular Session of the Human Rights Council*. April, 1–5.
- Council of Europe. (2019). Gender identity , violence and human rights. *Gender Matters Manual on Addressing Gender-Based Violence Affecting Young People.*, 1–41.
- Delhi, N., & Representative, C. (2017). *Report on the field visit of the UN-Women Executive Board Bureau to India*. April, 1–8.

- Diamant, J. (2022). *In India and many other countries, there is little gap between men and women in attitudes on gender issues*. Pewresearch.Org. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/15/in-india-and-many-other-countries-there-is-little-gap-between-men-and-women-in-attitudes-on-gender-issues/>
- Dwivedi, N., & Sachdeva, S. (2019). Gender-based violence in New Delhi, India: Forecast based on secondary data analysis. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 25(4), 262–268. <https://doi.org/10.26719/emhj.18.036>
- Equalitynow.org. (2020). *Justice Denied: Sexual Violence & Intersectional Discrimination – Barriers To Accessing Justice For Dalit Women And Girls In Haryana, India*. Equalitynow.Org. <https://www.equalitynow.org/resource/justicedenied/>
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Forbes-mewett, H., & Mcculloch, J. (2015). *International Students and Gender-Based Violence*. <https://doi.org/10.1177/1077801215602344>
- Gov.uk. (2021). *Country policy and information note: Religious minorities and scheduled castes and tribes, India, November 2021 (accessible)*. <https://www.gov.uk/government/publications/india-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-religious-minorities-and-scheduled-castes-and-tribes-india-november-2021-accessible#bookmark44>
- Hamzah, A. (2019). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Metode Penelitian Kepustakaan*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hindi-, D. B., & Sabha, P. (2015). *CASTE SYSTEM IN INDIA AARTI JAIN*. 6(12), 268–275.
- hindrise.org. (2018). *Gender-Based Violence in India: A Dark and Bitter Reality*. <https://hindrise.org/resources/gender-based-violence-in-india/>
- HindRise. (n.d.). *Gender Based Violence in India*. Retrieved June 26, 2022, from <https://hindrise.org/resources/gender-based-violence-in-india/>
- Humanium.org. (2011). *The situation of women in India*. <https://www.humanium.org/en/situation-women-india/>
- Hurd, I. (2011). *THEORIZING INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Choices and Methods in the Study of*. April 2010.
- Idsn.org. (2013). *India: Official Dalit population exceeds 200 million*. <https://idsn.org/india-official-dalit-population-exceeds-200-million/>
- India's Report: Beijing Declaration and Platform for Action 2019*. (2019).
- Isek, V. (2020). *A Panacea to Gender-Based Violence*. <https://www.ivint.org/a-panacea-to-gender-based-violence/>
- Iwda.org. (2018). *WHAT DOES INTERSECTIONAL FEMINISM ACTUALLY MEAN?* 11 Mei. <https://iwda.org.au/what-does-intersectional-feminism-actually-mean/>
- Jain, S. (2021). The Indian Caste System: A system of Social Stratification and its Implications on the Indian Society. *International Journal of Law Management & Humanities*, 4(2), 1627–1636. <https://www.dictionary.com/browse/veda>

- Jayakumar, L. (2020). Remembering the Kandhamal massacre, Twelve Years On. *Gaurilankeshnews.Com*. <https://gaurilankeshnews.com/remembering-the-kandhamal-massacre-twelve-years-on/>
- Kalle, A. S. & M. (2020). *Treating a silent cancer: How to tackle gender-based violence in MENA*. <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/treating-silent-cancer-how-tackle-gender-based-violence-mena>.
- Klugman, J., Hanmer, L., Twigg, S., Hasan, T., McCleary-Sills, J., & Santamaria, J. S. (2017). *Gender based violence and the law: World development report*. 1–44. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26198>
- Komang, N., & Suwastini, A. (2013). *PERKEMBANGAN FEMINISME BARAT DARI ABAD KEDELAPAN BELAS HINGGA POSTFEMINISME : SEBUAH TINJAUAN TEORETIS*. 2(1), 198–208.
- Komariah, D. satori & A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Kumar, D., & Gautam, A. (2015). Dr. Ambedkar Vision on the Caste Discrimination: A 21 st Century Challenge for Indian Democracy. *Print) International Research Journal of Management Sociology & Humanity (IRJMSH)*, 6(6), 42–44. www.irjmsh.com
- Kumar, S. (2022). *Intersectional Discrimination: Understanding the Indian Perspective*. 15 Februari. <https://nyaaya.org/guest-blog/intersectional-discrimination-understanding-the-indian-perspective/>
- Levine-rasky, C. (2011). *Social Identities : Journal for the Study of Race , Nation and Culture Intersectionality theory applied to whiteness and middle-classness*. October 2014, 37–41. <https://doi.org/10.1080/13504630.2011.558377>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Madre, & Female Solidarity for Integrated Peace and Development. (2018). *Gender-Based Violence and Discrimination against Women and Girls in the Democratic Republic of the Congo: A Report for the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. <https://www.madre.org/>
- Malgesini, G., Haggren, G., Duffy, K., Caves, C., & Ramadan, N. (2019). *Jiri Sironen (FI)*.
- Matter, R., & Perspectives, G. (2012). *Gender and Caste Intersectionality in India: An Analysis of the Nirbhaya Case December 16*. 1–17.
- Mosse, D. (2018). Caste and development: Contemporary perspectives on a structure of discrimination and advantage. *World Development*, 110, 422–436. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.003>
- N.M.P. Verma. (2021). Indian Economy Deceleration and Unsustainability. In *Devyani Publishers and Distributors* (Issue August).
- National Crime Records Bureau. (2019). *Crime in India 2018 Statistics*. 2, 449–902. [https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Crime in India 2018 - Volume 2.pdf](https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Crime%20in%20India%202018%20-%20Volume%202.pdf)
- NCDHR. (2021). *AIDMAM-report-final-cutmarks.pdf*.
- Ndiaye, N. A. (2021). *Gender-Based Violence in West Africa: The Cases of Senegal, Mali, Burkina Faso and Niger: FES Peace and Security Competence Centre Sub Saharan*

- Africa*. <https://pscc.fes.de/e/gender-based-violence-in-west-africa-the-cases-of-senegal-mali-burkina-faso-and-niger>
- Nikhil Rampal. (2022). *Madhya Pradesh & Rajasthan have highest crime rate against Dalits. Here's why*. Theprint.In. <https://theprint.in/india/madhya-pradesh-rajasthan-have-highest-crime-rate-against-dalits-heres-why/1110399/>
- Ohchr.org. (2013). *Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences finalises country mission to India*. <https://www.ohchr.org/en/statements/2013/05/special-rapporteur-violence-against-women-its-causes-and-consequences-finalises?LangID=E&NewsID=13282>
- Ohchr.org. (2022). *Country and other visits Special procedures*. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/country-and-other-visits>
- Pathak, P. (2021, January 9). *Problem Faced by Dalits in India*. <https://pscnotes.in/problem-faced-by-dalits-in-india/>
- Pettiford, Jill Steans & L. (2019). *Hubungan Internasional; perspektif dan tema*. Pustaka Pelajar.
- Policy, C., & Note, I. (2021). *Country Policy and Information Note India: Religious minorities and Scheduled Castes and Tribes*. November.
- Priyanka Garodia. (2021). *Gender-Based Violence in India: A Human Rights Approach*. Peaceforasia.Org. <https://peaceforasia.org/gender-based-violence-in-india-a-human-rights-approach/>
- Raju, N. (2020). *GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LAW AND JUSTICE*.
- Report, F. S. (2013). *the Contribution of Un Women To Increasing Women ' S Leadership and Participation in Peace and Security and in. September*.
- Rohkmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca.
- Rohkmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender & Feminisme*. Garudhawaca.
- Ross, L. J. (2017). Reproductive justice as intersectional feminist activism. *Souls*, 19(3), 286–314. <https://doi.org/10.1080/10999949.2017.1389634>
- Ross Wilson, T. D.-J. (2020). *Charge D'Affaires, Exclude, Gender Issues, News, U.S. Embassy in Kabul*. 20 December. <https://af.usembassy.gov/working-to-end-gbv-in-afghanistan/>.
- Sabharwal, N. S., & Sonalkar, W. (2015). Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste NIDHI SADANA SABHARWAL AND WANDANA SONALKAR. *Global Justice: Theory Practice Rhetoric*, 8(1). <https://www.theglobaljusticenetwork.org/index.php/gjn/article/view/54>
- Saha, P. (2021). *Navigating Trauma In Courtrooms: The Indian Legal System & Survivors Of Sexual Violence*. Feminisminindia.Com. <https://feminisminindia.com/2021/10/14/indian-courts-survivors-sexual-violence-shaming/>

- Sankaran, S., Sekerdej, M., & von Hecker, U. (2017). The role of Indian caste identity and caste inconsistent norms on status representation. *Frontiers in Psychology*, 8(MAR), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00487>
- Selvin, R. G. (2018). Caste system, Dalitization and its implications in contemporary India. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 10(7), 65–71. <https://doi.org/10.5897/ijsa2017.0713>
- Series, I., Sexual, O. N., Total, A., By, K., Partners, I., Members, O. R. F., Than, M., In, O. N. E., Having, G. R., Physical, E., Non-, P. V. O. R., Violence, P. S., Lifetime, I. N. T., Experienced, P. H., As, I., Of, A. R., & Violence, T. (2020). *GENDER-BASED VIOLENCE*.
- Seshasayee, H. (2019). *Addressing the Historical Roots of Gender-Based Violence in. April*.
- Sigiro, A. N., Gina, A., & Komalasari, D. (2020). Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid 19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal Melalui Pendekatan Feminisme Interseksional. *Jurnal Perempuan*, 25(4), 295–308.
- Sivakumar, B. (2013). *Half of India's dalit population lives in 4 states*. Timesofindia.Indiatimes.Com. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/half-of-indias-dalit-population-lives-in-4-states/articleshow/19827757.cms?from=mdr>
- Smith, S. (2018). Introducing Feminism in International Relations Theory Written by Sarah Smith Introducing Feminism in International Relations Theory. *E-International Relations*, 1(1), 1–4. <https://www.e-ir.info/2018/01/04/feminism-in-international-relations-theory/>
- Ster. (2020). *Top Ten Countries With the Highest GBV Rates in The World*. <https://standtoendrape.org/top-ten-countries-with-the-highest-gender-based-voilence-gbv-rates-in-the-world/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taylor, B. (2019). <https://www.womankind.org.uk/intersectionality-101-what-is-it-and-why-is-it-important/>. 24 November. <https://www.womankind.org.uk/intersectionality-101-what-is-it-and-why-is-it-important/>
- Tiwari, R. (2012). Caste System and Social Stratification in India. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2067936>
- Umin Kango. (2009). Bentuk-bentuk-kekerasan-yang-dialami-perempuan.pdf. In *Jurnal Legalitas* (Vol. 2, Issue 1, pp. 13–20).
- UN Women. (2014). *Beijing Declaration and Platform for Action Beijing + 5 Political Declaration and*.
- UN Women. (2022). *About us Programme Implementation*. <https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation>
- Unfpa.org. (2016). *Gender-based violence*. <https://esaro.unfpa.org/en/topics/human-rights-gender-equality>

- Unfpa.org. (2022). *Gender-based violence*. <https://esaro.unfpa.org/en/topics/gender-based-violence>
- UNFPA. (2019). The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming | UNFPA - United Nations Population Fund. *Gender-Based Violence Area of Responsibility*, 159. <https://www.unfpa.org/minimum-standards>
- Unicef.org. (2021). *Gender equality Every child deserves to reach her or his full potential, but gender inequalities in their lives and in the lives of those who care for them hinder this reality*. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/gender-equality>
- Union, S., Nations, U., Council, S., & Council, S. (2022). *International Organisations*.
- Unwomen.org. (2017). *About UN Women*. <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- Unwomen.org. (2018). *A comprehensive approach to ending violence against women in rural spaces in India*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/06/a-comprehensive-approach-to-ending-violence-against-women-in-rural-spaces-in-india>
- Unwomen.org. (2020). *Intersectional feminism: what it means and why it matters right now*. 1 July. <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters>
- Unwomen.org. (2021a). *Government partners*. <https://www.unwomen.org/en/partnerships/donor-countries>
- Unwomen.org. (2021b). *Partners*. <https://www.unwomen.org/en/partnerships>
- Unwomen.org. (2021c). *Regional and country coordination*. <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/regional-and-country-coordination>
- UNWOMEN. (2021). *Reckitt and UN Women partnership to create employment and entrepreneurship opportunities for women in India*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/08/reckitt-and-un-women-partnership-to-create-employment-and-entrepreneurship-opportunities-for-women>
- Upriety, S., & Lamichhane, B. (2016). *SERIES*. February.
- Veenstra, G. (2011). *Race , gender , class , and sexual orientation : intersecting axes of inequality and self-rated health in Canada*. 1–11.
- Vpva.rutgers.edu. (2022). *Contributing Factors*. <http://vpva.rutgers.edu/contributing-factors/>
- Weforum.org. (2019). *What are the causes of gender inequality in India?* <https://www.weforum.org/agenda/2019/02/causes-gender-inequality-india/>
- WHO, & HRP. (2016). *Addressing Violence against Women in Afghanistan : The health system response*. 2.
- Wirasandi. (2019). Wanita dalam pendekatan Feminisme. *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 47–58.

- Wirtz, A. L., Pham, K., Glass, N., Loochkartt, S., Kidane, T., Cuspoca, D., Rubenstein, L. S., Singh, S., & Vu, A. (2014). Gender-based violence in conflict and displacement: Qualitative findings from displaced women in Colombia. *Conflict and Health*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/1752-1505-8-10>
- Worldbank.org. (2019). *Gender-Based Violence (Violence Against Women and Girls)*. <https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls>